

Perempuan Menggapai Tiang Negara

Oleh:

Brigida Intan

Dosen Sejarah di FKIP

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta



BEBERAPA kajian tentang peran perempuan menjadi dominan untuk beberapa aspek pada era ini. Namun, media untuk mengekspresikan diri belum didukung sepenuhnya oleh pemerintah bahkan sebagian kalangan. Pembangunan

dan pemberdayaan perempuan telah diupayakan pemerintah Indonesia dan didukung oleh 189 negara di New York dalam forum Pembangunan Milenium MDGs (Millenium Development Goals) pada bulan September 2000.

Setelah sepuluh tahun lebih berlalu beberapa sasaran telah dipenuhi namun belum sesuai target. Meski telah banyak menyumbang dalam sektor sosial, namun dalam dua dekade terakhir hanya menyentuh permukaan saja.

>> KE HAL 15

Perempuan Menggapai

Sambungan dari halaman 9

Pemenuhan kuota mempengaruhi aspirasi

Ketika kemerdekaan telah diraih, posisi perempuan dalam jabatan pemerintah belum mencapai target minimal yaitu 30%. Faktanya verifikasi KPU yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM untuk calon Parpol atau Parpol baru tidak mampu memastikan bahwa 30% perempuan di semua jenjang kepengurusan sesuai dengan fakta lapangan.

Banyak perempuan yang selama ini diakomodir sebagai pengurus tapi tidak memiliki kesempatan untuk maju menjadi Caleg. Tujuannya ialah mengambil perempuan hanya untuk kepengurusan Parpol. Akibatnya Parpol bisa saja mengambil 'perempuan non-kader' sebagai Caleg. Termasuk mengambil perempuan yang tidak punya pengalaman di bidang politik. Biasanya yang dipilih adalah mereka yang tidak berkeberatan ditempatkan di nomor urut caleg paling akhir.

Permasalahan dari sisi eksternal muncul disebabkan oleh kebijakan yang terstruktur. Pertama, tema peristiwa-peristiwa besar negara Indonesia hanya seputar politik dan militer, sedikit sekali mengangkat tentang derajat kemanusiaan atau bidang sosial lainnya. Kedua, peristiwa masa lalu, pada umumnya

bersifat elitis dan membicarakan para pembesar. Padahal segala upaya telah dikerahkan kaum perempuan untuk dapat menggerakkan sejarah.

Di samping itu ada pula penyebab timbulnya masalah internal. Pertama, ketika melihat rapat MPR RI atau DPR RI yang mengambil keputusan penting, anggota parlemen dari kalangan perempuan harus dihadapkan pada persoalan menghadapi tuntutan 'tidak pulang larut' dari rumah, sehingga pada saat yang sama harus mengorbankan hak suaranya untuk memilih atau dipilih. Kedua, kepekaan terhadap situasi menjadi momok sebagian besar perempuan Indonesia, ditambah lagi istilah hanya untuk "meramalkan" dalam dunia politik.

Sebagai pembanding kita lihat bahwa masyarakat di Indonesia mengenal stratifikasi sosial. Pada umumnya dikenal tiga lapisan masyarakat yaitu kaum aristokrat yang menempati lapisan atas, dan kaum yang lebih rendah yaitu wong cilik (Jawa), rakyat biasa, atau cacah (Sunda). Perempuan dapat diistilahkan sebagai "Tiang Negara". Beberapa bukti menunjukkan bahwa perempuan mampu menyesuaikan diri dalam berbagai aspek. Di Bali tenaga kerja perempuan bukan hanya menguasai pekerjaan halus namun

juga pekerjaan kasar, seperti tukang batu. Kemudian Ratu Kalinyamat membuktikan diri dengan menguasai galangan kapal di Jepara pada abad ke-16.

Pembuktian besar juga ditunjukkan sejarah bahwa perempuan pernah membangun negara. Pertama, kejayaan ratu Sima yang bertahta sebagai ratu dari Kerajaan Kalingga pada abad ke-7, yang memerintah dengan adil dan bijak. Kedua, Ratu dari Majapahit yaitu Sri Gitaraja bergelar Tribhuwana Wijayatunggadewi (1328-1350). Ketiga, seorang pemimpin bernama Ratu Syarifah Fatimah memerintah kerajaan di Kesultanan Banten dan menduduki jabatan pada tahun 1748. Keempat, dalam mitologi Sunda juga dikenal tokoh Sunan Ambu dan Pohaci (Sanghyang Sri), yang juga dikenal sebagai Dewi Sri atau Dewi Padi.

Masajaya itu sekarang mulai surut namun sebagian kalangan tidak tinggal diam. Pemerintah dan para politisi perempuan yang berada pada level birokrat mengupayakan penghapusan istilah "konco wingking, swargo nunut neroko katut" dalam bahasa Jawa. Dahulu orang mengenal ungkapan perempuan itu kodratnya hanya "di dapur, di sumur, di kasur". Ini menunjukkan bahwa status sosial telah melemahkan posisi perempuan sebagai "tiang

negara" atau fondasi keutuhan politik negara.

Alternatif sebagai pemecahan

Tidak banyak waktu tersisa untuk perempuan mempersiapkan arah gerakan politiknya. Sejatinya seruan-seruan 17% lebih perempuan dan pasal 28H ayat (2) UUD 1945 telah mewakili aspirasi masyarakat. Maka, beberapa hal diharapkan mampu menjadi solusi. Pertama, kaum perempuan tanggap kesadaran humanis, sadar akan generasi digital dan kreatif karena mereka mampu mendapatkan sumber valid dengan konteks yang lebih kontemporer, generasi ini mampu menggali satu kekuatan dan menjadi media penyalur aspirasi perjuangan kaum perempuan.

Kedua, PEMILU 2019 tinggal 3 tahun, ada dua alternatif perjuangan yang bisa dilakukan perempuan Indonesia saat ini: meneruskan keterwakilan melalui seperangkat arah politik dengan perbaikan-perbaikan yang ada atau memusatkan tenaga dan pikiran untuk ikut melahirkan kekuatan baru yang menentukan generasi baru. Akhirnya, diperlukan kajian dan gerakan yang menjadi media untuk meyakinkan bahwa perempuan juga memiliki porsi yang sama dalam membangun negara tanpa lepas dari kodratnya. ***

Divoting

Sebagian Fraksi jinkan 3 Maret 1950

JOGJA -- Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) penetapan hari jadi DIY belum mengerucut kesepakatan. Sebagian fraksi di DPRD DIY usulkan penetapan hari jadi DIY jatuh pada 3 1950 bertepatan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 tentang pembentukan provinsi DIY. Hal itu berbeda dengan draf pengajuan yang memilih hari jadi DIY jatuh pada 13 1755 bertepatan dengan sejarah pengukuhan kubumi sebagai Hamengku Buwono I. Hasil rapat internal Pansus, Selasa (12/7) kemarin terjadi dialektika dalam menetapkan hari jadi DIY. Fraksi PAN yang diwakili oleh Sunanta mengemukakan bahwa tanggal 13 Maret